

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

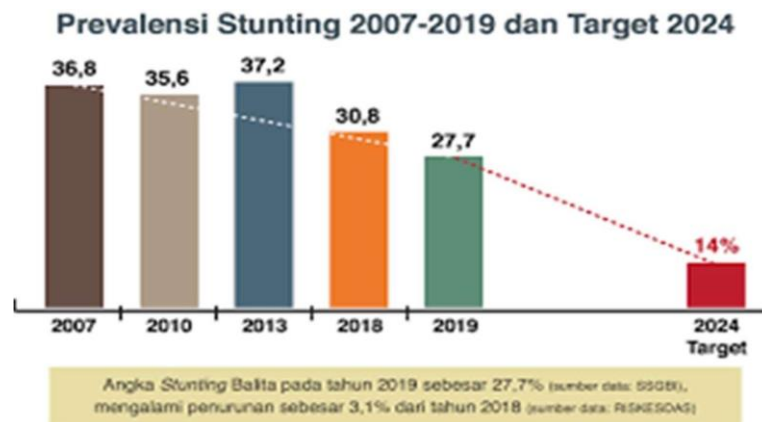
Indonesia berada pada urutan ke-115 dari 151 negara dengan kasus *Stunting* di seluruh dunia. Tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mendidik anak menjadi generasi emas. Sehingga *Stunting* masih menjadi masalah gizi utama pada bayi dan balita di Indonesia. Situasi ini menghambat momentum generasi emas anak Indonesia dan harus segera disikapi. *Stunting* adalah kegagalan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, 2021).

Masalah *Stunting* saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendapat banyak perhatian, banyak pihak yang peduli dengan *Stunting* sebab penyakit ini mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Di Indonesia sendiri jumlah kasus *Stunting* masih tinggi meskipun dari tahun ke tahun terus menurun, sehingga masalah pencegahan *Stunting* masyarakat mendapatkan perhatian lebih. Hingga tahun 2018, telah ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai daerah prioritas penurunan *Stunting*. Dan diperkirakan jumlah ini akan bertambah

sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Telah banyak upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dalam atau luar negeri (Sri Andriani Rumuat, 2022).

Konsep *Stunting* sering diidentikkan dengan kata kerdil atau perawakan pendek, namun sebenarnya adalah suatu kondisi dimana seorang anak gagal tumbuh kembang terutama pada usia di bawah lima tahun (toddler). Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang selama 1000 HPK. *Stunting* dapat diatasi agar tidak menjadi *Stunting* atau dievaluasi itu pada seribu hari kehidupan pertama. Sehingga ketika bayi lahir sampai umur dua tahun masih bisa dilakukan pencegahan atau intervensi agar tidak menjadi *Stunting*.

Gambar 1. 1 *Prevalensi Stunting 2007-2019*



Sumber: Media Indonesia.com

Berdasarkan gambar diatas *stunting* merupakan masalah gizi global, termasuk di Indonesia (WHO, UNICEF & Group, 2018). Secara nasional, prevalensi balita *Stunting* mengalami penurunan dari 30,8% tahun 2018 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018) menjadi 24,7% tahun 2021 pada hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (Izwardy, 2020). Penurunan prevalensi *Stunting* belum mencapai target global WHO dibawah 20% (WHO, 2018) dan target RPJMN 2024 sebesar 14% (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, 2021; Kementerian Kesehatan RI., 2020). Masih dibutuhkan upaya-upaya penurunan kejadian *Stunting*, karena efek jangka pendek dan panjang dari *Stunting* sangat luas dan bersifat permanen.

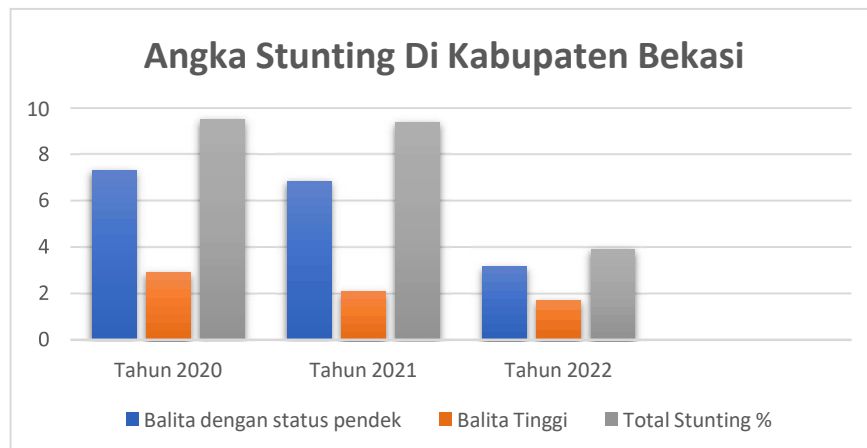
Bayi dan anak membutuhkan asupan makanan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi mengakibatkan bayi dan anak mengalami malnutrisi, gizi buruk, *Stunting*, wasting, kecerdasan otak tidak maksimal, penurunan daya tahan tubuh dan masalah pertumbuhan serta perkembangan yang terhambat, bahkan kematian. Lebih dari 50% kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi (World Health Organization, 2017). Hal ini berpotensi menurunnya daya saing bangsa, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Langkah ini membutuhkan komitmen tinggi dan upaya bersama dari semua pihak secara konvergen, bukan saja dukungan dari pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun desa, tetapi juga peran aktif seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Relatif terhadap usia balita, prevalensi keterlambatan perkembangan terjadi terutama pada balita antara usia 24 sampai 59 bulan. Kekurangan gizi kronis (*Stunting*) disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Secara garis besar penyebab *Stunting* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu komunitas, keluarga (*family*) dan individu. Di tingkat masyarakat, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem sanitasi dan air bersih merupakan faktor yang berkaitan terhadap *Stunting*. Di tingkat rumah tangga (*household*), yaitu kualitas dan kuantitas makanan yang tidak memadai, tingkat pendapatan, jumlah dan struktur anggota keluarga, praktik pemberian makan anak, pelayanan kesehatan dasar, sanitasi dan air bersih yang tidak memadai merupakan faktor penyebab *Stunting*. Faktor penyebab tingkat rumah tangga mempengaruhi kondisi seperti asupan makanan yang tidak seimbang, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kesehatan yang buruk pada anak di bawah usia 5 tahun. Rumah tangga dengan pendapatan rendah memiliki prevalensi kurus dan perawakan pendek yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga dengan pendapatan stabil. Kesehatan seorang anak juga dipengaruhi oleh faktor yaitu tingkat pendidikan ibu, pendidikan yang baik memberikan ibu pengetahuan yang cukup untuk mengasuh anak sehingga mampu memberikan makanan yang sehat (Ulfah, 2019).

Ada faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor genetik meliputi faktor bawaan dari orang tua, antara lain normal dan abnormal, jenis kelamin dan kebangsaan. Faktor lingkungan meliputi kesehatan ibu, rangsangan orang tua dan kebiasaan dari masa kehamilan hingga pasca melahirkan, stimulasi orang tua dan adat istiadat (Alifariki, 2020).

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, pembangunan kesehatan dihadapkan pada beberapa kondisi dan isu penting, yaitu kesehatan adalah hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tantangan global yang ditimbulkan oleh investasi, perubahan demografis dan epidemiologis, serta kebijakan perdagangan bebas. Demokrasi berkembang ke segala bidang dan aspek kehidupan. Jika isu-isu penting ini ditangani dengan baik, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan kesehatan di masa depan. Kabupaten Bekasi berada di bawah wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan berbagai pekerjaan pembangunan kesehatan dan “Kemerdekaan dan Keadilan” Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2033 “Tumbuh Berkeadilan dan Berkelanjutan” Visi “masyarakat”, baik sebelum era pemerintahan daerah sendiri maupun sampai sekarang terus menerus dan terus menerus dipacu pembangunan dibidang Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, 2021).

Gambar 1. 2 Prevalensi Angka *Stunting* Di Kabupaten Bekasi



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas angka *stunting* di kabupaten Bekasi menurut EPPGBM yaitu pada tahun 2020 sebesar 9.480 atau 4,4% kasus *stunting*, pada tahun 2021 sebesar 9.354 atau 4,3% kasus *stunting*, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu 3.899 atau 1,6% kasus *stunting* sedangkan menurut penghitungan SSGI pada tahun 2021 sebesar 21%, pada tahun 2022 turun menjadi 17% Bupati Bekasi mengatakan, tekanan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan menjadi penyebab *Stunting* di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi juga mengatakan, penurunan angka *Stunting* di Kabupaten Bekasi membutuhkan kerja multisektoral dan intensif dari gugus tugas. Untuk keluarga yang termasuk dalam kategori perawatan, ini berarti keluarga tersebut sudah memiliki bukti *Stunting*. Untuk keluarga dalam kategori miskin dan terhambat, mereka diikutsertakan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja dan penanaman modal atau menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan Kesejahteraan Sosial jika mereka tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasa (Erlita Firdanti et al., 2020).

Gambar 1. 3 Prevalensi *Stunting* di Provinsi Jawa Barat



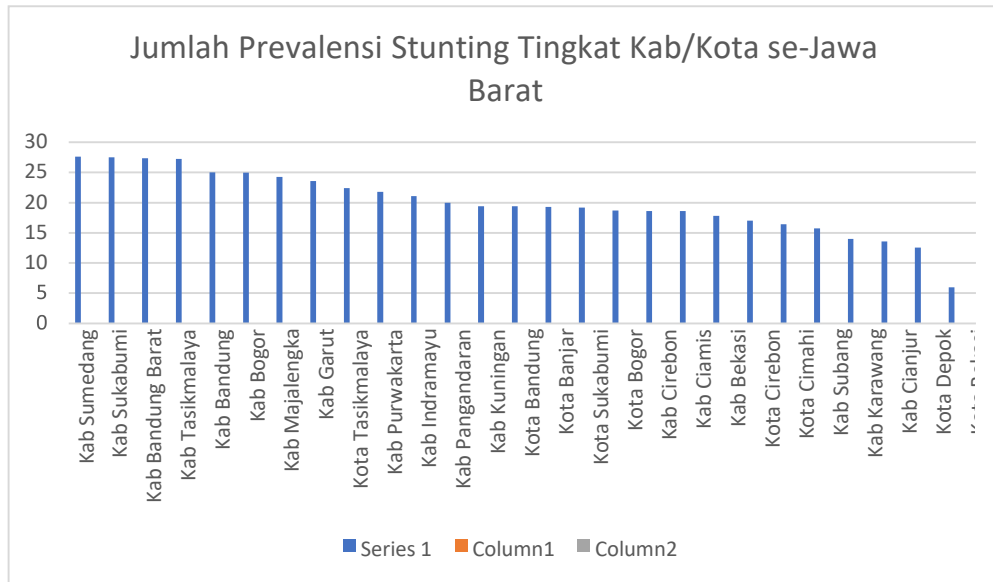
Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan gambar diatas, prevalensi balita stunting di Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada 2022. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-22 secara nasional. Angka tersebut pun menurun 4,3 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, prevalensi balita stunting di Jawa Barat sebesar 24,5 persen. Tercatat, ada 11 kabupaten/kota dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 16 kabupaten/kota di bawah angka provinsi.

Kabupaten Sumedang tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 27,6 persen pada SSGI 2022. Angka balita stunting di kabupaten ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya sebesar 22 persen. Adapun prevalensi balita stunting di Kota Bekasi tercatat paling kecil di Jawa Barat, yakni hanya 6 persen. Setelahnya, ada Kota Depok sebesar 12,6 persen, serta Kabupaten Cianjur sebesar 13,6 persen. Sementara Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan signifikan mencapai 7,4 persen dan Kabupaten Cianjur jadi daerah dengan penurunan signifikan sebesar -20,1 persen. Berikut prevalensi balita stunting di Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota pada 2022:

Gambar 1. 4

Jumlah Prevalensi *Stunting* Tingkat Kab/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: diolah oleh peneliti

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Percepatan
2. Penurunan *Stunting*?
3. Bagaimana *Collaborative governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Menganalisis *Collaborative governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi.
3. Menganalisis Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua signifikansi yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### 1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Collaborative governance* pada percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi.

Penelitian pertama ditulis oleh Erna Widyawati, Sudaryanti tahun 2022 yang berjudul Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka *Stunting* Pada Balita. Permasalahan angka *Stunting* di Kabupaten Sragen masih tinggi dan dari data BPS Kementerian kesehatan, Integrasi Susenas Maret 2019 dan konsolidasi SGBI Tahun 2019, Kabupaten

Sragen memiliki angka *Stunting* tertinggi dibandingkan provinsi lain yakni sekitar 32,40%. Tentunya permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang *komprehensif* dan terpadu oleh unsur pemerintah melalui instansi terkait dan berdaya di bidang kesehatan masyarakat, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Responsivitas Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sragen dalam menurunkan angka *Stunting* pada balita.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, serta data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel bersifat *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka *Stunting* pada Balita sudah cukup responsive untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, memiliki kegiatan prioritas yang telah disusun serta mampu mengembangkan program pelayanan seperti berinovasi dan bekerjasama dengan lintas sektor.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pemerintah dalam penurunan angka *Stunting*.

Penelitian kedua ditulis oleh Priyono tahun 2020 yang berjudul Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah *Stunting* di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Stunting* merupakan masalah global karena dampaknya akan menentukan masa depan suatu negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki prevalensi *Stunting* yang tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi *Stunting* tercatat pada 8,7 juta (30,7%) bayi dibawah usia 5 tahun (balita) yang mengalami *Stunting*. Angka tersebut masih jauh dari angka target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka *Stunting* tidak lebih dari 20%. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan penurunan *Stunting* adalah kegagalan untuk mengembangkan strategi yang *komprehensive* untuk mengembangkan pelaksanaan program intervensi mendukung pencegahan *Stunting*, mulai perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penelitian dilakukan mulai Februari sampai dengan Juli 2020 dengan tujuan menganalisis perancangan strategi percepatan penurunan *Stunting* perdesaan, lokasi penelitian di Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat uji coba aksi cegah *Stunting* yang dilaksanakan pada Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 yang menghasilkan contoh baik (*best practices*) percepatan penurunan *Stunting* perdesaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan SWOT dalam penentuan alternatif program intervensi dan strategi yang efektif untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Hasil penelitian menunjukkan program intervensi dengan sasaran utama peningkatan pola asuh anak balita/bawah dua tahun (baduta) melalui program intervensi peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *Stunting* periode 1.000 HPK perlu diprioritaskan untuk percepatan (akselerator) penurunan *Stunting*

perdesaan. Hasil evaluasi faktor strategi internal dan eksternal analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk percepatan penurunan *Stunting* adalah kombinasi strategi agresif. Dalam jangka pendek perlu dioptimalkan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sedangkan strategi jangka panjang perlu diintensifkan peluang dukungan kolaborasi antar sektor dan *multistakeholders* guna menjamin keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi penurunan *Stunting*. Selain itu perlu penerapan strategi *Public Private Partnership* dalam upaya penegakan tatakelola (*governance*) diperlukan komitmen penjabaran operasional agar menjamin program pencegahan *Stunting* balita perdesaan pada 1.000 HPK.

Relevansi penelitian ini yaitu dalam penerapan kebijakan penurunan *Stunting*. Dengan rujukan ini juga peneliti mengetahui implementasi strategi penurunan *Stunting*.

Penelitian ketiga ditulis oleh Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto tahun 2021 yang berjudul *Collaborative governance* Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten. *Stunting* merupakan salah satu masalah nasional yang pencegahannya masih dilakukan hingga saat ini. Permasalahan *Stunting* merupakan masalah jangka panjang yang berpengaruh pada masa depan dan beban negara. Desa Kalirandu merupakan salah satu desa yang memiliki angka *Stunting* yang tinggi dan termasuk dalam desa lokus *Stunting*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan kerja sama yang terjalin dalam penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi

kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuh informan sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan sangat efektif ketika melihat fenomena interaksi pribadi, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala terkait sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat melalui kader *Stunting* yang masih rendah, dominasi bidang kesehatan dalam penanganan *Stunting* di Desa Kalirandu, rendahnya komitmen kepala desa dan masalah pengungkahan data. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumberdaya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan proses tata kelola kolaboratif dalam penurunan angka *Stunting*. Rujukan ini juga menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung kolaboratif dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Penelitian Keempat ditulis oleh Sukanti, Nur Faidati tahun 2021 yang berjudul *Collaborative governance* Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Sleman. Kasus *Stunting* di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan *Stunting* tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak,

melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model *collaborative governance*, peran masing-masing pemangku kepentingan dan desain kelembagaan dalam upaya penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Datayang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang diukur dari dinamika kerja sama yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan *Stunting* pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak *collaborative governance* ini adalah menurunnya angka *Stunting* dan masyarakat lebih tereduksi. Kolaborasi ini telah menghasilkan desain kelembagaan berupa model akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar dilakukan monitoring dan evaluasi, peran swasta dan seluruh *stakeholders* harus memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholders*.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dijadikan acuan pada kajian teori. Rujukan ini memberikan gambaran bagaimana konsep *Collaborative governance* dalam upaya penanggulangan *Stunting*.

Penelitian kelima ditulis oleh Tjetjep Yudiana tahun 2022 yang berjudul Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Kepulauan Riau. Prevalensi *Stunting* di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 (16.8%), menurun pada tahun 2021 menjadi 17,6%.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi sebagai strategi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mencapai target nasional (14%) pada tahun 2024. Berdasarkan SSGBI, intervensi tertentu di Provinsi Kepulauan Riau memiliki peringkat lebih tinggi dari rata-rata nasional adalah pemeriksaan kehamilan (94,6%), pemberian zat besi (94%), Pemberian suplemen gizi atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil (100%), Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (97,7%), persalinan di fasilitas kesehatan (95,5%), kunjungan neonatal (101,7%), ASI eksklusif (58%), PMT Balita (98,7%) imunisasi (89,6%). Intervensi yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional adalah: penimbangan Balita di Posyandu (56,7%) dan pemberian vitamin A (60,4%). Intervensi sensitive yang sudah terlaksana dengan baik dibandingakandengan rata-rata nasional adalah; KB setelah persalinan (39,6%), akses untuk air minum yang layak digunakan(90,41%), dan persentase kemiskinan (5,75%). Berbagai jenis ikan laut relatif murah dan mudah dijangkau dan adanya bantuan modal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Banyak orang yang masih salah

memahami *Stunting* sebagai ancaman, menolak menggunakan fasilitas sanitasi, dan banyak yang bosan mengonsumsi biskuit pemberi makanan tambahan atau suplemen dari pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dijadikan acuan pada kajian teori. Rujukan ini memberikan gambaran bagaimana konsep *Collaborative governance* dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Penelitian keenam ditulis oleh Ahmad Saufi tahun 2021 yang berjudul *Dinamika Collaborative governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19*. *Stunting* menjadi perhatian dan tantangan utama bagi negara ini mengingat adanya bonus demografi 2045. Belum tuntasnya penanggulangan *Stunting*, prioritas negara kembali diuji dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Kedaruratan di sektor kesehatan terutama pada perbaikan gizi dan pemulihan telah berdampak pada perekonomian sehingga menjadi semakin terpuruk. Peran multi *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk membangun komitmen, berbagi perspektif, dukungan sumber daya dan kekuatan pemangku kepentingan selama krisis ini. Modal terpenting dalam kerjasama adalah komunikasi. Pemerintah sebagai aktor kunci kolaborasi harus memunculkan ide-ide yang mendorong para pihak untuk mengambil tindakan strategis. Selain itu, dukungan sumber daya dan keterbukaan publik diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dari semua *stakeholders*. Lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi membutuhkan



perspektif bersama, menghargai inovasi dan menghindari ketergantungan pada sumber daya pada *stakeholders* lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan menurut Sutrisno (1990) ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dan sumber referensi lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanggulangan *Stunting* mengenal istilah intervensi Spesifik dan sensitif untuk pencegahan *Stunting*. Intervensi tertentu merupakan program jangka pendek yang difokuskan pada pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* yang dalam program intervensi ini dan berkolaborasi dengan Puskesmas, Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa. Intervensi gizi spesifik dilakukan dua metode yakni pada saat kehamilan dan setelah kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif adalah upaya untuk memperkuat komunitas pemberdayaan masyarakat di wilayah yang menjadi fokus *Stunting* dan lebih bersifat jangka panjang. Dinas Sosial yang bertugas dalam mengawal pemberdayaan bersinergi dengan BKKBN dan pemerintah Desa. Pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dibagi menjadi dua jenis kegiatan yakni membangun fasilitas kesehatan dan membantu masyarakat yang dianggap rentan dan terdampak.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dijadikan acuan pada kajian teori. Rujukan ini memberikan gambaran bagaimana konsep *Collaborative governance* dalam penanggulangan angka *Stunting*.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Ipan, Hanny Purnamasari, dan Evi Priyanti tahun 2021 yang berjudul *Collaborative governance* dalam penanganan *Stunting*. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses kolaborasi untuk mengatasi penanganan *Stunting* di UPTD Puskesmas Ciampel. Proses kolaborasi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat diharapkan dapat menangani atau mengatasi masalah *Stunting* yang kompleks. Penanganan *Stunting* membutuhkan keterlibatan aktor non-pemerintah mengingat masalah perlambatan pertumbuhan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, terutama sektor kesehatan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Peneliti melakukan penelusuran secara langsung di lapangan agar memperoleh data yang sesuai. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi untuk mengatasi *Stunting* berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan penurunan angka *Stunting* di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada penerapan konsep kolaborasi sebagai upaya penurunan angka *Stunting*. Rujukan ini juga memberikan gambaran proses kolaborasi dalam penanganan *Stunting* yang berjalan dengan cukup baik.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Sri Andriani Rumuat dan Hamdin Husin tahun 2022 yang berjudul *Collaborative governance* Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Banggai. *Collaborative governance* dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banggai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan populasi berjumlah 534 orang dan sampel berjumlah 41 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan rumus Taro Yamane. Data dikumpulkan melalui observasi, pembagian kuesioner, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan metode presentase Skor Kriteria. Untuk mengukur bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banggai dalam penelitian ini yaitu terdiri dari delapan sub variabel dan 14 indikator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola *collaborative governance* dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banggai sudah sangat baik dalam satu presentasi (87,1%), dengan rincian untuk sub variabel *networked structure*(struktur jaringan) dengan presentasi 92,07% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan) dengan presentasi 90,24% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel *trust among the participants* (kepercayaan) dengan presentasi 89,02% (termasuk kategori sangat baik), sub variabel tata kelola kepastian *governance* dengan presentasi 83,6% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel

*access to authority* (akses terhadap kekuasaan) dengan presentasi 85,3% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel *distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas) dengan presentasi 87,5% (termasuk kategori sangat baik), untuk sub variabel *information sharing* (berbagi informasi) dengan presentasi 87,1% (termasuk kategori sangat baik), dan untuk sub variabel *access to resources* (akses terhadap sumber daya) dengan presentasi 84,1% (termasuk kategori sangat baik). Artinya bahwa, *collaborative governance* dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banggai secara keseluruhan berdasarkan penelitian berada pada kategori sangat baik.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan proses tata kelola kolaboratif dalam penurunan angka *Stunting*. Rujukan ini juga memberikan gambaran proses kolaborasi dalam penanganan *Stunting* yang berjalan dengan cukup baik.

Penelitian kesembilan yang ditulis oleh Nur Amaliyah Riyadh, Andi Surahman Batara dan Andi Nurlinda pada tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam pelaksanaan program *Stunting* di kabupaten Enrekang

Masalah gizi pada balita masih menjadi masalah utama kependudukan, salah satunya adalah *Stunting*. Untuk mengatasi permasalahan *Stunting*, pemerintah harus memfokuskan semua upaya, termasuk intervensi spesifik dan

intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Jenis penelitian ini adalah quasi kualitatif mengeksplorasi efektivitas kebijakan *Stunting* melalui indepth interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dipilih melalui purposive sampling terhadap 1 orang sebagai informan kunci, dan 19 orang sebagai informan biasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang untuk mendukung upaya percepatan dan penanggulangan *Stunting* adalah keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli *Stunting* di Kabupaten Enrekang dan didukung juga dengan peraturan bupati lain untuk menurunkan *Stunting* di Kabupaten Enrekang. Peraturan bupati bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi *Stunting* di Kabupaten Enrekang. Respon Masyarakat terhadap langkah-langkah yang diterapkan di Kabupaten Enrekang sangat positif. Kesimpulannya yaitu Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Enrekang sudah terlaksana secara maksimal.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah terkait implementasi kebijakan penanggulangan penurunan *Stunting*. Dengan adanya rujukan ini juga peneliti mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dalam penanggulangan penurunan *Stunting*.

Penelitian kesepuluh yang ditulis oleh Unti Nur Halisah, Dra. Irma Irawati P, Roos Yulastina Tahun 2018 yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Sumenep NO. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* ( Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang percepatan penanggulangan *Stunting* dan sosialisasi dari sebuah kebijakan tentang percepatan penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sumenep.

Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai Peraturan Bupati No. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *Stunting*. Peraturan ini didasari semakin tingginya angka *Stunting* pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Metode ini menggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu melakukan metode dengan tiga cara yaitu melakukan wawancara, melakukan observasi secara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Sumenep telah menerapkan kebijakan penanggulangan *Stunting*. Implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model pendekatan Mazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau hukum dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, Perangkat daerah dan tokoh masyarakat.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah terkait implementasi kebijakan penanggulangan penurunan *Stunting*. Dengan adanya rujukan ini juga peneliti

mengetahui strategi sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan penurunan *Stunting*.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas implementasi *collaborative governance* dalam percepatan penurunan *Stunting* ((Sukanti & Faidati, 2021); (Yudiana, 2022); (Saufi, 2021); (Ipan et al., 2021); (Riyadh et al., 2013)). Pada beberapa penelitian hanya mengkaji implementasi kebijakan *Stunting* ((Widyawati, 2022); (Priyono, 2020); (Sri Andriani Rumuat, 2022)). Kemudian terdapat juga penelitian yang membahas terkait kedua variabel tersebut yaitu kolaborasi dan *Stunting* dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* ((Putri & Herbasuki Nurcahyanto, 2021)).

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan melalui analisis *Collaborative governance* Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bekasi.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

##### **1. Manfaat bagi Penulis**

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mendalam peneliti terkait dengan *Collaborative governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

##### **2. Manfaat bagi Pemerintah**

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi lembaga pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Bupati Kabupaten Bekasi, dan masyarakat Kabupaten

Bekasi dalam pengimplementasian percepatan penurunan *Stunting*, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

### 3. Manfaat bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam percepatan penurunan *Stunting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan *Stunting* khususnya di Kabupaten Bekasi. Dengan kajian ini pula dapat memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam proses *Collaborative governance* dalam pelaksanaan program Percepatan Penurunan *Stunting*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan penulis, agar di peroleh pembahasan yang memberikan penjelasan secara keseluruhan, untuk itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan deskripsi umum mengenai deskripsi umum terkait dasar kajian yang diteliti. Dalam bab ini meliputi latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi



menjadi dua yaitu, signifikansi akademis dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjabarkan mengenai teori yang dirujuk dalam penelitian yang sedang diteliti terkait *Collaborative governance* dalam program Percepatan Penurunan *Stunting*. Peneliti menggunakan teori *Collaborative governance* dan Percepatan Penurunan *Stunting*. Kemudian dalam bab ini juga menjabarkan terkait kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan memaparkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian.